

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dalam Mustikarini dan Fitriani (2012) menggambarkan adanya hubungan kerja antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agen*), adanya pemisahan kepemilikan oleh *principal* dengan pengendalian oleh agen dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara *principal* dan *agen*. Di satu sisi, *agen* secara moral bertanggung jawab mengoptimalkan keuntungan *principal*, namun di sisi lain manajemen juga berkepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri, sehingga cenderung menimbulkan masalah agensi.

Menurut (Halim dan Abullah 2005) pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar *agency theory*, diakui atau tidak di pemerintahan daerah terdapat hubungan dan masalah keagenan. Menurut Lane dalam Mustikarini dan Fitriani (2012) mengatakan bahwa teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Hal yang sama dikemukakan oleh Moe dalam Mustikarini dan Fitriani (2012) yang menjelaskan konsep ekonomis organisasi sektor publik dengan menggunakan teori keagenan. Bergman dan Lane dalam Setiawan (2012) menyatakan bahwa kerangka

hubungan prinsipal agen merupakan satu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik.

(Mardiasmo 2002) menjelaskan tentang akuntabilitas dalam konteks sektor publik bahwa, pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pernyataan ini mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent*.

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* bagi masyarakat *principal* akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaikbaiknya bagi kepentingan masyarakat. *Agency theory* beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak *principal* (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. (Setiawan 2012) beranggapan bahwa Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi *information asymmetry*.

Berdasar *agency theory* pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Setiawan (2012), menyatakan pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang itu artinya *informatif asymmetry* yang terjadi dapat berkurang. Dengan semakin berkurangnya *information asymmetry* maka kemungkinan untuk melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil.

2. Akuntabilitas

Dalam konteks organisasi pemerintah sering ada istilah akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya *good governance* di Indonesia semakin meningkat. Tuntutan ini memang

wajar, apalagi dengan terjadinya beberapa kasus yang terjadi beberapa tahun ini yang mengaitkan dengan proses akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah yang buruk. Sunarsip dalam Mustikarini (2012) pada penelitiannya ia menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan (*bad governance*) dan buruknya birokrasi.

Salah satu elemen penopang akuntabilitas adalah transparansi. Transparansi digambarkan sebagai ketersediaan informasi kepada publik atas transaksi pemerintah dan proses pengambilan keputusan, dan merupakan dasar untuk manajemen di semua negara demokrasi. Transparansi berarti bahwa individu, grup, atau organisasi dalam hubungan akuntabilitas diarahkan tanpa adanya kebohongan atau motivasi yang tersembunyi, dan bahwa seluruh informasi kinerja lengkap dan tidak memiliki tujuan menghilangkan data yang memiliki hubungan dengan masalah tertentu.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Rahmanurrajjid (2008) menyatakan bahwa keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.

Untuk mewujudkan transparansi itu, maka dikeluarkan PP Nomor 3 Tahun 2007 pasal 2 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Pasal 9 PP Nomor 3 Tahun 2007 juga menegaskan bahwa penyusunan LPPD menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkelanjutan menuju keadaan yang lebih baik dari sebelumnya selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kuznets dalam Sayekti (2011) perubahan struktur ditandai dengan: (1). Adanya perubahan persentase penduduk yang bekerja di berbagai sektor, (2). Menurunnya sumbangan sektor pertanian terhadap produksi nasional, (3). Meningkatnya sumbangan sektor industri terhadap produksi nasional, (4). Sektor jasa tidak begitu mengalami perubahan.

Hasil penelitian yang dilakukan Chenery dalam Sayekti (2011) adalah terjadinya perubahan struktural ditandai dengan adanya perubahan sumbangan

berbagai sektor dan industri-industri dalam sub sektor industri pengolahan kepada produksi nasional. Pertumbuhan ekonomi adalah sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat Sukirno dalam Sayekti (2011). Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Menurut Arsyad dalam Sayekti (2011) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto atau Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Ada enam ciri proses pertumbuhan ekonomi seperti yang dikemukakan Kuznets dalam Sayekti (2011) yaitu: (1). Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertambahan penduduk yang tinggi. (2). Tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi, khususnya produktivitas tenaga kerja. (3). Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi. (4). Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi. (5). Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha menambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku. (6). Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sepertiga bagian penduduk dunia.

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Menurut ekonom Klasik, Smith, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk dalam Deddy Rustiono (2008). Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara ada tiga :

1. Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat dimana jumlah sumber daya alam yang tersedia mempunyai batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian.
2. Sumber daya insani (jumlah penduduk) merupakan peran pasif dalam proses pertumbuhan output, maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja.
3. Stok modal merupakan unsur produksi yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan output.

Laju pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas sektorsektor dalam menggunakan faktor-faktor produksinya. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui berbagai sarana pendidikan, pelatihan dan manajemen yang lebih baik.

b. Teori Pertumbuhan Baru (*New Growth Theory*)

Teori ini memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan yang bersifat endogen, Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari dalam sistem ekonomi. Teori ini menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh sistem produksi, bukan berasal dari luar sistem. Kemajuan teknologi merupakan hal yang endogen, pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan pelaku-pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan. Peran modal lebih besar dari sekedar bagian dari pendapatan apabila modal

yang tumbuh bukan hanya modal fisik saja tapi menyangkut modal manusia Romer dalam Deddy Rustiono (2008) Akumulasi modal merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi. Definisi modal/kapital diperluas dengan memasukkan modal ilmu pengetahuan dan modal sumber daya manusia. Perubahan teknologi bukan sesuatu yang berasal dari luar model atau eksogen tapi teknologi merupakan bagian dari proses pertumbuhan ekonomi.

4. Investasi

Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.

Investasi adalah kata kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena disamping akan mendorong kenaikan output secara signifikan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat Makmun dan Yasin dalam Sayekti (2011).

Todaro dalam Sayekti (2011) mengemukakan bahwa persyaratan umum pembangunan ekonomi ada 3 (tiga) yaitu: a) Akumulasi modal, termasuk akumulasi modal baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia, b) perkembangan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja dan keahliannya, c) kemajuan teknologi. Akumulasi modal akan berhasil apabila beberapa bagian atau proporsi pendapatan yang ada ditabung

dan diinvestasikan untuk memperbesar produk (*output*) dan pendapatan di kemudian hari.

Menurut (Sukirno 2005) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni: (1). investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja, (2). penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi. (3). investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

5. Tenaga Kerja

Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 17 tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja.

Sumberdaya manusia mengandung dua pengertian, yaitu: (1). Sumberdaya manusia yang mengandung pengertian usaha kerja, artinya sumberdaya

manusia yang mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. (2). Sumberdaya manusia yang menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Pengertian mampu bekerja adalah mampu untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan nilai ekonomis yang berupa barang dan jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas.

Masalah ketenagakerjaan ini dikemukakan oleh Lewis dalam Sayekti (2011) mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja di sektor lain. Lewis dalam Sayekti (2011) mengemukakan bahwa di negara terbelakang terdiri dari dua sektor di dalam perekonomian, yaitu: (1). Sektor tradisional, yaitu sektor pedesaan subsisten yang berkelebihan penduduk dan ditandai dengan produktivitas marginal tenaga kerja sama dengan nol. Sektor tradisional ini dikatakan mempunyai kelebihan penawaran tenaga kerja dan tingkat upah yang lebih murah. (2). Sektor industri perkotaan modern yang tingkat produktivitasnya tinggi dan menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang ditransfer sedikit demi sedikit dari sektor subsistem.

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Subri 2003). Simanjuntak dalam Sayekti (2011) mengelompokkan tenaga kerja menjadi dua yaitu angkatan

kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (*labor force*) terdiri dari golongan yang bekerja dan menganggur atau yang mencari pekerjaan. Golongan yang bukan angkatan kerja terdiri dari yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain yang menerima pendapatan. Jumlah tenaga kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja dapat juga diartikan sebagai penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan. (Makmun dan Yasin 2003) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang negatif selama tahun 1998 dan tahun 1999 sangat mempengaruhi penciptaan lapangan kerja.

Tujuan adanya perluasan kesempatan kerja adalah: (1). Menurunkan tingkat pengangguran yang terbuka maupun yang tersembunyi; (2). Berkembangnya kesempatan kerja yang semakin mampu menyerap angkatan kerja baru; (3). Menurunkan beban ketergantungan setiap orang yang bekerja.

Dengan adanya penciptaan kesempatan kerja baru berarti adanya penciptaan pendapatan masyarakat yang akan mendorong daya beli masyarakat. Penciptaan kesempatan kerja baru juga dapat mendorong *induced investment*, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Gravitiani (2006). Permintaan tenaga kerja juga mengidentifikasikan adanya determinasi permintaan tenaga kerja antara lain Arfida (2003): (1). tingkat

upah, (2). teknologi, (3). produktivitas, (4). kualitas tenaga kerja, (5). fasilitas modal

6. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah atau wilayah (Sukirno 2005). Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Landau dalam Sayekti (2011) membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang militer dan pendidikan berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara untuk pendidikan sendiri berkorelasi kuat dan investasi pemerintah berkorelasi positif tetapi tidak signifikan.

Lin dalam Sayekti (2011) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDB) dengan laju yang semakin mengecil. Lin juga menyatakan bahwa Hukum Wagner hanya berlaku untuk negara maju. Pengeluaran Pemerintah dapat ikut mendorong pergerakan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan barang modal dalam bidang pembangunan infrastruktur sosial (kesehatan, pendidikan, dan fasilitas

umum/publik) yang dianggarkan dalam belanja pembangunan. Melalui anggaran rutin, khususnya belanja rutin pegawai yang berupa gaji pegawai, pemerintah dapat mendorong perekonomian melalui konsumsi masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (pusat-Propinsi-daerah). Pada masing-masing tingkatan dalam pemerintah ini dapat mempunyai keputusan akhir-proses pembuatan yang berbeda dan hanya beberapa hal pemerintah yang di bawahnya dapat dipengaruhi oleh pemerintah yang lebih tinggi Lee Robert *et al.*, dalam Sayekti (2011).

Menurut Barro dalam Sayekti (2011), kontribusi pengeluaran produktif akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya untuk pengeluaran yang tidak produktif akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Mankiw (2003) menjelaskan bahwa dengan adanya kenaikan pemerintah (ekspansi fiskal) maka akan menghambat investasi, yang pada gilirannya menurunkan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

7. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen penerimaan / pendapatan daerah disamping dana perimbangan maupun lain – lain pendapatan daerah yang sah. PAD menurut (Halim 2001) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut (Bratakusumah dan Solihin 2002) pengertian PAD adalah pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang

bersangkutan guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut. Dalam kenyataannya PAD terdiri dari empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut (Bastian 2002) PAD adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini dapat diketahui dari pos belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Rumus untuk menghitung PAD yaitu:

$$\text{PAD} = \text{Pajak daerah} + \text{Retribusi daerah} + \text{Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah}$$

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, investasi, tenaga kerja, pengeluaran pemerintah dan PAD, antara lain:

Wibisono (2005) dalam penelitiannya yang berjudul *Determinan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Empiris Antar Propinsi di Indonesia*. Variabel tergantung yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi regional pada 26 Propinsi di Indonesia (tidak termasuk Timtim) tahun 1975–1995, dan variabel bebas yang digunakan adalah *educational attainment*, *life expectancy*, tingkat inflasi, tingkat fertilitas, tingkat kematian bayi dan dummy regional.

Metode yang digunakan adalah *Ordinary Least Square*. Hasil penelitiannya adalah: (1). Variabel yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi adalah pendidikan, angka harapan hidup, dan tingkat kematian bayi. (2). Tingkat fertilitas dan laju inflasi memberikan efek negatif pada pertumbuhan ekonomi. (3). Propinsi-propinsi yang memiliki modal manusia yang tinggi akan tumbuh lebih cepat terhadap posisi *steady state*-nya masing-masing. (4). Peningkatan *educational attainment* sebesar satu satuan akan meningkatkan pertumbuhan PDRB sebesar 1,5% sampai dengan 2,6%.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawati dan Hamzah (2007) Analisis kota di Propinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran pada kabupaten dan sedangkan belanja pembangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Pancawati (2000) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Rasio Kapital Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Stok Kapital dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap GDP Indonesia. Variabel tergantung yang digunakan adalah pertumbuhan output (Y) dan variabel bebas yang digunakan adalah: rasio kapital-tenaga kerja, tingkat pendidikan, perubahan stok kapital dan pertumbuhan penduduk. Analisis yang digunakan adalah regresi dengan metode OLS. Hasil penelitiannya adalah: (1). Rasio kapital-tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan output. (2). Tingkat pendidikan

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan output. (3). Perubahan stok kapital berpengaruh positif terhadap pertumbuhan output. (4). Pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan output.

Alkadri (2006) dalam penelitiannya yang berjudul Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia 1969-1996. Hasil penelitiannya: (1). Variabel yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi: bantuan luar negeri, PMA, PMDN, Pajak, Pengeluaran Pemerintah dan pertumbuhan angkatan kerja. (2). Variabel yang berpengaruh lemah terhadap pertumbuhan ekonomi: tabungan, ekspor, dan impor.

Yuliarmi (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Propinsi Bali. Variabel tergantung yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi Propinsi Bali (1994-2005), sedangkan variabel bebas yang digunakan adalah konsumsi rumah tangga, investasi dan pengeluaran pemerintah daerah. Analisis yang digunakan adalah regresi linear sederhana dengan menggunakan metode OLS. Hasil penelitiannya adalah variabel bebas yang berupa konsumsi rumah tangga, investasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi propinsi Bali.

Diah Prasasti (2006) dalam penelitiannya yang berjudul Perkembangan PDRB per kapita 30 Propinsi di Indonesia periode 1993-2003: pendekatan disparitas regional dan konvergensi. Variabel tergantung yang digunakan adalah PDRB per kapita, sedangkan variabel bebasnya adalah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang berhasil menamatkan jenjang SMU, angkatan

kerja, *dummy* variabel sumber daya alam dan *dummy* variabel krisis (mulai tahun 1997=1). Hasil penelitiannya adalah: (1). Variabel penduduk yang tamat SMU bernilai positif dan signifikan. (2). Variabel angkatan kerja tidak signifikan. (3). Variabel *dummy* SDA menunjukkan hubungan positif dan signifikan. (4). Variabel *dummy* krisis menunjukkan hubungan yang negatif dan signifikan di semua model.

C. Hipotesis

1. Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah

Menurut penelitian Achmad Sjfii (2009) Peningkatan investasi swasta, pertumbuhan tenaga kerja, pengeluaran pemerintah untuk bidang pembangunan manusia, maupun konsumsi pemerintah lokal mempunyai peranan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun perubahan eksternal pada makro ekonomi yakni krisis ekonomi akan berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Jamzani Sodik & Didi Nuryadin (2005) diketahui bahwa investasi baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan arah yang positif. Kemudian penelitian yang dilakukan Rafli Rinaldi (2013) diketahui investasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi swasta tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis 1: Investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah

2. Pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah

Menurut penelitian yang dilakukan Dewi Kurniawati Sunusi, Anderson Kumenaung, Debby Rotinsulu (2014) diketahui tenaga Kerja berpengaruh secara langsung dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berarti semakin tinggi tingkat tenaga kerja semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi. Adapun penelitian yang dilakukan Yoga Krissawindaru Arta (2013) yaitu angkatan Kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dwi Suryanto (2011) bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis 2: Tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah

3. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Desi Dwi Bastias (2010) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah atas perumahan dan pengeluaran pemerintah atas transportasi berpengaruh signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Tommy Prio Haryanto

(2013) yaitu pengeluaran pemerintah untuk belanja tidak langsung mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah untuk belanja langsung mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Deddy Rustiono (2008) menunjukkan pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi positif signifikan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis 3: Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah

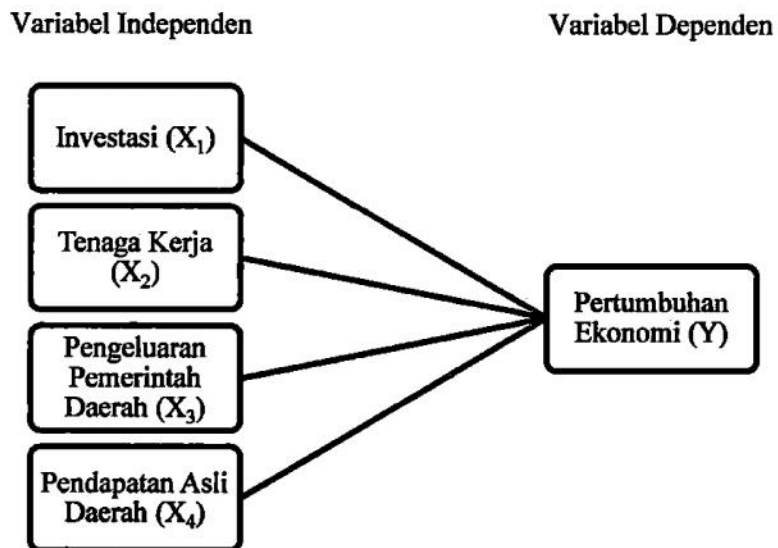
4. Pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Budi Santosa (2013) diketahui bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Anis Setiyawati dan Hamzah (2007) diketahui bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Putu Ngurah Panji Kartika Jaya dan A.A.N.B. Dwirandra (2014) diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis 4: PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah

D. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini, akan meneliti factor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen Y yaitu pertumbuhan ekonomi dan variabel independen X yaitu investasi, tenaga kerja, pengeluaran pemerintah dan pendapatan asli daerah.



Gambar 2.1
Model Penelitian